

Budaya kerja Pemerintah dan Sikap Masyarakat
Oleh : Drs. Rusdan M.Si
Dosen STIE Satu Nusa Bandar Lampung

Abstrak

Salah satu dimensi yang menjadi fokus perhatian dalam proses-proses Pemerintahan adalah budaya kerja pemerintah, yang didalamnya mengandung terkait dengan tata nilai yang diyakini dan terwujud dalam pola tindak cerminan dari sikap dan aktivitas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Budaya kerja pemerintah tersebut akan menentukan dan menunjukkan kualitas serta produktivitas kerja. Pada akhirnya disikapi masyarakat baik yang bersifat positif maupun negatif melalui respon secara kognitif, afektif dan evaluatif.

Kata Kunci : Budaya kerja, sikap.

I. Pendahuluan

Setelah terbentuknya pemerintah baru pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo mengedepankan jargon “kerja, kerja dan kerja”. Bila dilihat secara mendalam pernyataan tersebut merupakan upaya untuk menjawab harapan masyarakat tentang pentingnya ada perubahan orientasi pemerintah berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Sudah menjadi pengetahuan umum, sering ada sindiran bahkan kritikan tentang posisi pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak menyentuh dan berorientasi untuk memenuhi

kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Bila dilihat dari keluasan dan daya jangkauannya pemerintah sangat *powerfull* dan mampu *survive* dalam berbagai keadaan. Seperti dikemukakan Ndraha (1999 : 365) bahwa organisasi pemerintahan sebagai organisasi kekuasaan, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, merekayasa dan mengubah lingkungan dengan menggunakan kewenangan, kekuatan, paksaan dan kekerasan yang sah.

Secara normatif, pemerintah dibentuk dengan tujuan utama untuk menjaga suatu sistem agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan secara wajar, karena

pemerintah merupakan alat negara dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat hidup layak dan mencapai keadaan yang lebih baik. Menurut Osborn dan Gaebler (1999 : 192) menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah mencari cara untuk dapat menyenangkan warganya. Pendapat tersebut bermakna pemerintah dibentuk untuk menyelenggarakan kepentingan umum agar kebutuhan bersama dapat dikelola secara tertib dan teratur.

Dewasa ini posisi pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selalu menjadi penilaian masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang hubungan posisional keduanya. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar. Bahkan saat ini sudah dijadikan alat ukur penting kinerja pemerintah. Semakin besarnya tuntutan masyarakat, semakin besar tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Hal ini tidak terlepas dari posisi hubungan antara pemerintah dan masyarakat, bahwa keberadaan pemerintah utamanya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Menyadari tugas dan tanggung jawab yang berat dan sulit tersebut, maka pemerintah harus membenahi diri dengan mengupayakan secara terus menerus

perbaikan kerja untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu aspek yang dianggap penting dan urgen untuk dibenahi. Untuk mengefektifkan tugas dan kewenangan tersebut, pertimbangan kecepatan dan kelancaran dalam menjalankan tugasnya sebagai konsekuensi semakin tingginya tuntutan masyarakat dianggap cara yang efisien untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Ndraha (2000 : 65) bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk menyelesaikan suatu urusan atau konflik dan tidak boleh menolak untuk mendengarkan tuntutan setiap warga masyarakat dengan alasan apapun. Setiap masalah harus dapat diselesaikan sedemikian mungkin, terbuka mungkin dan setuntas mungkin.

Bila dilihat secara kritis maka salah satu aspek penting yang menjadi alas posisi strategis tersebut adalah budaya kerja pemerintah yang terwujud dalam unit-unit kerja yang ada. Budaya kerja yang terwujud dalam kebiasaan, sikap dan perilaku sebagai cerminan dari sistem nilai yang diyakini.

Budaya kerja dari pemerintah yang direpresentasikan sikap dan perilaku aparaturnya secara kelembagaan, pada akhirnya akan mempengaruhi sikap masyarakat terhadap pemerintah sebagai unit pelayanan publik. Sudah menjadi pendapat umum bahwa unit kerja pemerintah yang berfungsi memenuhi kepentingan masyarakat, sering diidentikkan dengan

kelambanan, kesulitan atau istilah negatif lainnya karena sangat sulitnya untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Padahal fungsi yang dijalankan oleh pemerintah berbeda dengan swasta, karena fungsi pemerintah dalam memenuhi kepentingan masyarakat yang tidak dapat dilakukan oleh organisasi lain, terutama organisasi yang berorientasi pasar yang pada akhirnya akan menciptakan ketidakadilan. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban kepada masyarakat tanpa diskriminasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah. Bila dikaitkan dengan makna sikap terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat dipengaruhi oleh dan karena itu dapat diubah melalui (Ndraha : 1999 : 193) :

1. Informas dan pengetahuan tentang kerja
2. Kesadaran akan kepentingan tertentu

Dinyatakan bahwa informasi dan pengetahuan tentang kerja memperbesar volume ruang kognitif manusia, dan pada gilrannya hal ini memperluas alternatif dan kesempatan kerja. Selanjutnya, jika kepentingan berubah sikap yterhadap kerja juga berubah. Selanjutnya, akan muncul perilaku pada waktu bekerja. Orientasi perilaku bekerja sangat tergantung dari sikap terhadap pekerjaan. akhirnya akan mendapat respons dari masyarakat. Respons tersebut, menunjukkan penilaian

masyarakat terhadap pemerintah yang teraktualisasi dalam sikap masyarakat dalam menilai pemerintah tersebut. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang keterkaitan antara budaya kerja pemerintah dengan sikap masyarakat..

II. Konsepsi Budaya Kerja dan Sikap

a. Konsepsi Budaya Kerja

Konsep budaya kerja muncul pada saat semakin berkembang dan rumitnya organisasi dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Salah seorang pemerhati masalah budaya kerja, Paramita (Ndraha : 1999 : 189) menyatakan budaya kerja sebagai “ sekelompok pikiran dasar atau program mental yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kerjasama manusia yang dimiliki oleh suatu golongan masyarakat”. Pendapat di atas, menunjukkan bahwa budaya kerja berkaitan erat dengan kondisi dan orientasi berfikir serta sikap mental dari sekelompok orang yang akan tercermin dan berdampak terhadap capaian kerja. Secara lebih mendalam budaya kerja merupakan alas utama yang menentkan kualitas kerja dan produktivitas kerja dari sekelompok orang. Selanjutnya Paramita (Ndraha : 1999 : 189) bahwa Budaya kerja dapat dibagi menjadi :

1. Sikap terhadap pekerjaan, yakni kesukaan akan kerja dibandingkan dengan kegiatan lain seperti

bersantai, atau semata-mata memperoleh kepuasan dari kesibukan pekerjaannya sendiri, atau merasa terpaksa melakukan sesuatu hanya untuk kelangsungan hidupnya.

2. Perilaku pada waktu bekerja seperti rajin berdedikasi, bertanggungjawab, berhati-hati, teliti, cermat, kemauan yang kuat untuk mempelajari tugas dan kewajibannya, suka membantu sesama karyawan atau sebaliknya.

Dengan demikian, budaya kerja terkait dengan kemampuan individu-individu mempersepsikan dalam memaknai pekerjaan yang terbentuk melalui dan oleh interaksi antara pelaku dalam organisasi dan lingkungan sekitarnya. Pada fase selanjutnya akan terwujud dalam aktivitas sebagai implementasi dari penyikapan terhadap pekerjaan tersebut.

b. Konsepsi sikap

Secara konseptual, sikap merupakan padanan kata yang dikemukakan oleh Herbert Spencer dengan kata *attitude* yang menunjukkan tentang sikap mental seseorang (Ahmadi : 1999 : 161). Pemahaman tentang istilah sikap tersebut mengarah pada kondisi psikologis seseorang dalam mempersepsikan lingkungannya. Menurut L. Thurstone (Ahmadi, 1999:163), sikap sebagai tingkatan kecenderungan yang bersifat positif

atau negatif yang berhubungan dengan objek psikologi. Objek psikologi di sini meliputi simbol, kata-kata, slogan, lembaga, ide dan sebagainya. Seseorang dikatakan memiliki sikap positif terhadap objek psikologi apabila ia suka atau, sebaliknya orang yang dikatakan memiliki sikap yang negatif terhadap objek psikologi bila ia tidak suka. Pendapat tersebut berkesesuaian dengan pendapat Marat (Sastroatmodjo : 1995 : 4) menyatakan sikap sebagai kesiapan bereaksi terhadap objek lingkungan tertentu.

Batasan pengertian yang dikemukakan Marhat tersebut, sikap terbentuk melalui suatu proses memaknai tentang segala sesuatu, baik fakta maupun fenomena yang berada diluar diri seseorang. Segala sesuatu tersebut baik bersifat materi maupun non materi seperti manusia, institusi atau nilai-nilai yang terwujud dalam perilaku orang lain, yang pada akhirnya di respon oleh seseorang. Respon tersebut mengendap dalam diri seseorang dan akhirnya dipersepsi dalam diri seseorang sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, perasaan dan penilaian terhadap kondisi di luar diri seseorang tersebut. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sikap berkaitan dengan terbentuknya persepsi seseorang secara akumulatif terhadap objek tertentu. Persepsi tersebut sebagai bentuk respon terhadap situasi yang melingkupi dirinya, sehingga membentuk penilaian terhadap objek

atau situasi tertentu. Dengan demikian sikap menentukan sifat, hakekat, baik perbuatan sekarang maupun akan datang.

. Seperti dikemukakan oleh Ahmadi (1999 : 171) sikap yang dimiliki seseorang dipengaruhi faktor utama, yakni faktor intern (dalam diri) dan faktor ekstern (luar diri) :

1. Faktor intern, merupakan yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri, faktor ini berupa *selectivity* atau daya pilih seseorang untuk menerima atau mengolah pengaruh yang datang dari luar. Pilihan terhadap pengaruh dari luar itu biasanya disesuaikan dengan motif dan sikap di dalam diri manusia, terutama yang menjadi minat perhatiannya.
2. Faktor ekstern, merupakan faktor yang terdapat di luar pribadi manusia. Faktor ini berupa interaksi sosial di luar kelompok. Misalnya interaksi antara manusia yang dengan hasil kebudayaan manusia yang sampai padanya melalui alat-alat komunikasi.

Dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa sikap terbentuk dari kondisi diri seseorang (Ahmadi : 1999 : 162) yakni komponen kognitif, komponen afektif dan komponen evaluatif / Konatif . Komponen kognitif di dalamnya mengandung pandangan, keyakinan yang dimiliki seseorang berdasarkan pengetahuan atau pengalaman seseorang artinya wawasan

seseorang akan mempengaruhi sikap seorang. Sedangkan pada sisi lain dalam diri seseorang terdapat perasaan, yakni suka atau tidak suka, senang atau tidak senang terhadap situasi luar diri seseorang. Selain itu juga terdapat . Komponen ini terkait situasi emosi seseorang terhadap kondisi luar dirinya. Sedangkan komponen evaluatif/konatif menunjukkan kecenderungan seseorang untuk mengevaluasi dari keseluruhan situasi yang ada, yang diikuti kecenderungan untuk bertindak.

III. Sikap masyarakat terhadap Budaya Kerja Pemerintah

Berkaitan dengan hak yang dimiliki masyarakat terhadap tanggung jawab pemerintah melalui sistem, prosedur dan metode tertentu. Sesuai dengan pendapat Ndraha (2000 : 147) bahwa pemerintah adalah semua badan publik yang tugas pokoknya memproduksi dan mendistribusikan alat pemenuh kebutuhan rakyat, yang disebut jasa publik yang tidak di privatisasikan dan layanan civil. Secara sederhana pernyataan tersebut menyangkut berbagai kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Menurut definisi di atas, jika ditinjau dari sisi pemerintahan tidak lain adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkenaan dengan hak-hak yang dimilikinya.

Pada hakekatnya orientasi tugas dan wewenang pemerintah ditujukan kepada masyarakat sudah menjadi tugas dan tanggung jawab yang bersifat melekat. Sehingga secara posisional masyarakat sebagai dapat memngevaluasi atau menilai tentang amanah yang diberikan kepada pemerintah sehingga jasa publik dan layanan civil dapat dirasakan saat dibutuhkan dalam jumlah yang memadai. Jasa publik dan layanan civil tersebut merupakan monopoli pemerintah karena menyangkut kepentingan orang banyak. Monopoli tersebut tidak terlepas dari urgensinya dilihat dari sudut kepentingan masyarakat, sehingga dapat dikataorkan fungsi primer pemerintah,

Sebagai wujud pemenuhan kebutuhan tersebut pemerintah wajib memberikan kepada masyarakat yang bertujuan memenuhi kebutuhannya. Peranan pemerintah tersebut tujuan utamanya menjaga suatu sistem agar masyarakat dapat merealisasikan yang menjadi kebutuhan mereka. Seperti dikemukakan oleh Woworuntu (1997 : 19) masyarakat perlu diperlukan dipuaskan melalui pemenuhan kebutuhannya sehingga masyarakat sebagai seorang raja . Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban kepada masyarakat tanpa diskriminasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah. Bila dikaitkan dengan budaya kerja pemerintah , maka ada dua unsur yang dapat memberikan makna. Pada

satu sisi budaya kerja terkait dengan sikap terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Sikap terhadap pekerjaan ini sangat dipengaruhi oleh dan karena itu dapat diubah melalui (Ndraha : 1999 : 193) :

3. Informas dan pengetahuan tentang kerja
4. Kesadaran akan kepentingan tertentu

Dinyatakan bahwa informasi dan pengetahuan tentang kerja memperbesar volume ruang kognitif manusia, dan pada gilirannya hal ini memperluas alternatif dan kesempatan kerja. Informasi dan pengetahuan serta kesadaran akan kepentingan tertentu pada akhirnya membentuk sistem keyakinan tentang makna kerja bagi mereka. Sehingga sikap terhadap pekerjaan merupakan manifestasi sistem nilai yang ada dalam diri pemerintah sebagai organisasi. Selanjutnya, unsur-unsur yang ada dalam sikap kerja itu berubah, maka secara langsung akan mempengaruhi perubahan sikap dalam memaknai kerja. Selanjutnya, akan muncul perilaku baru pada waktu bekerja. Oleh sebab itu Orientasi perilaku bekerja sangat tergantung dari sikap terhadap pekerjaan dan pada akhirnya mencerminkan budaya kerja pemerintah.

Prinsipnya pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah diharapkan memiliki kemampuan untuk

memenuhi kepentingan masyarakat . Pada dasarnya kepentingan umum adalah bentuk kepentingan yang menyangkut orang banyak atau masyarakat, tidak bertentangan dengan norma atau aturan, yang kepentingan tersebut bersumber pada kebutuhan hidup orang banyak. Sudah jelas bahwa tugas dan wewenang dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan umum, karena jika suatu kepentingan terhambat atau tidak terpenuhi akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat pemerintah membentuk unit kerja atau organisasi yang bertugas.

Dengan demikian nampak bahwa budaya kerja pemerintah yang tercermin dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, pada akhirnya akan membentuk sikap masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini bermakna budaya kerja pemerintah yang terwujud dalam berbagai aktivitas selalu bersentuhan dengan kualitas dan produktivitas kerja. Kesemua hal tersebut tergantung dari (Ndraha : 1999 : 187) ethos kerja yakni sebagai watak atau semangat fundamental suatu budaya, berbagai ungkapan yang menunjukkan kepercayaan, kebiasaan atau perilaku suatu kelompok masyarakat. Dalam ethos kerja ada terdapat intisari yang memberi makna tentang pekerjaan, dari yang bersifat negatif, seperti pekerjaan sebagai hukuman, beban, keharusan, hingga pekerjaan sebagai

suatu yang bersifat positif, seperti kerja sebagai tanggung jawab, kesenangan, pengabdian, harga diri, ibadah.

Secara akumulatif, budaya kerja pemerintah yang terwujud dalam ethos kerja pada dasarnya bersumber pada sistem nilai yang diyakini. Yakni tentang persepsi yang dimunculkan tentang kebenaran, kebaikan, kemanfaatan dan keberhargaan dalam aktivitas bekerja. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah pada akhirnya bermuara pada perbandingan antara kenyataan dengan harapan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah. Kondisi tersebut pada fase selanjutnya memunculkan penyikapan masyarakat terhadap pemerintah. Sikap seseorang dalam menilai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah tersebut sangat tergantung dari persepsi yang ada dalam diri seseorang, sesuai dengan latar belakang pengalaman dan kondisi psikologis yang mewarnai sikap seseorang. Komponen yang mempengaruhi sikap seseorang. Baik komponen kognitif, yang berhubungan gejala mengenai pikiran . Berwujud pengalaman, keyakinan, pengetahuan, individu terhadap objek tertentu, komponen afektif, menyangkut perasaan terhadap objek tertentu seperti senang atau tidak senang, marah, simpati, serta komponen evaluatif, kecenderungan untuk menilai dan

melakukan tindakan terhadap suatu objek.

Respon secara kognitif, afektif dan evaluatif akan mempengaruhi terbentuknya sikap masyarakat terhadap budaya kerja pemerintah. Apabila pemerintah mampu menunjukkan kualitas dan produktivitas kerja yang sesuai dengan harapan masyarakat, maka akan memunculkan sikap respon yang positif. Sebaliknya, apabila pemerintah tidak menunjukkan pola kerja yang berkesesuaian dengan harapan masyarakat maka sikap respon yang mengemuka bersifat negatif. Faktor-faktor yang menentukan orientasi sikap tersebut, dipengaruhi oleh kondisi-kondisi internal dari pihak memberikan respon, yakni kemampuan untuk mempersepsikan segala sesuatu berdasarkan sistem nilai dalam dirinya. Pada sisi lain, faktor eksternal, yakni lingkungan yang melingkupinya baik lingkungan sosial budaya maupun lingkungan non fisik menentukan respon terhadap segala sesuatu yang dinilainya. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk berupaya merubah dan mengembangkan budaya kerja yang sesuai dengan harapan masyarakat untuk mewujudkan respon positif terhadap budaya kerja pemerintah.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan tentang budaya kerja pemerintah dan hubungannya dengan penyikapan

masyarakat, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Budaya kerja pemerintah secara konsepsional menunjukkan kecenderungan dalam memikirkan dan menyikapi pekerjaan, yang beralas pada nsistem nilai yang diyakini.
2. Sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan, terwujud dalam ethos kerja, yang berkaitan dengan kemampuan memaknai tugas dan wewenang. Ethos kerja tersebut bersumber pada sistem nilai yang diyakini tentang kebenaran, kemanfaatan, keberhargaan dan kebaikan
3. Budaya kerja pemerintah tersebut pada akhirnya akan direspon oleh masyarakat berdasarkan komponen kognitif, afektif dan evaluatif yang mengarah pada dua kecenderungan, yakni sikap positif dan sikap negatif.

Daftar Pustaka

- Ahmadi , Abu, 1999. *Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, .
- Ndraha, Talizuduhu, 1999, *Teori Budaya Organisasi*, BKU IIP-UNPAD, Jakarta
-, 2000, *Ilmu Pemerintahan II*, BKU UNPAD- IIP, Jakarta,
-, 2000, *Ilmu Pemerintahan III*, BKU UNPAD-IIP, Jakarta
- Osborne, David, dan Ted Gaebler,1999, *Mewirauahakan Birokrasi*, (Terjemahan Muhammad Rosyid), Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta
- Sastroatmodjo, Sudijono, 1995 *Perilaku Politik*, IKIP semarang Press, Semarang,.
- Woworuntu, Bob,1997, *Dasar-Dasar Ketrampilan Abdi Negara Melayani Masyarakat*, Gramedia, Jakarta,